

**PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DAN
PROSPEKNYA DI INDONESIA****Slamet Panuntun¹, Asyrofi Aziz²**¹SETIAWS Semarang²Universitas Ivet Semarangtun2wildan@gmail.com¹, azizasyrofi1973@gmail.com²**Abstrak**

Pendidikan multikultural adalah model yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan mengatasi konflik yang semakin meningkat. Tujuan utama pendidikan multikultural dalam konteks ini adalah untuk mengembangkan sikap simpati, rasa hormat, penghargaan, dan empati terhadap pengikut agama dan budaya yang berbeda. Yang penting, strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan siswa memahami pelajaran mereka tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka dan mendorong mereka untuk berperilaku secara humanistik, pluralistik, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan tentang pendidikan multikultural dan prospeknya di Indonesia. Peneliti mengumpulkan publikasi akademis, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami penelitian sebelumnya, isu-isu saat ini, dan perkembangan dalam bidang multikulturalisme di Indonesia. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Responden potensial wawancara termasuk pejabat pemerintah, pendidik, administrator lembaga pendidikan, siswa, dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam isu multikulturalisme. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel yang lebih besar, seperti guru atau siswa di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Survei dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang persepsi, sikap, dan pemahaman tentang multikulturalisme, serta prospeknya dalam komunitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural, partisipasi dan dukungan dari guru atau profesor, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan pendidikan lainnya sangat penting. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan jika dilakukan dengan konsep dan batasan Syariah Islam.

Kata Kunci: Pendidikan, Multikulturalisme, Prospek, Indonesia.

Abstract

Multicultural education is a model expected to create peace and address the growing conflicts. The primary goal of multicultural education in this context is to foster attitudes of sympathy, respect, appreciation, and empathy towards followers of different religions and cultures. Importantly, this multicultural education strategy aims not only to make it easier for students to comprehend their lessons but also to increase their awareness and encourage them to behave in a humanistic, pluralistic, and democratic manner. This research employs a qualitative approach, involving the collection, analysis, and synthesis of relevant literature on multicultural education and its prospects in Indonesia. The researcher gathers academic publications, scientific journals, books, and other related sources to understand previous research, current issues, and developments in the field of multiculturalism in Indonesia. Interviews are conducted to obtain direct data from various stakeholders involved in multicultural education in Indonesia. Potential interview respondents include government officials, educators, educational institution administrators, students, and other community members engaged in multiculturalism issues. Surveys are used to collect data from a larger sample, such as teachers or students in various educational institutions in Indonesia. Surveys can provide broader insights into perceptions, attitudes, and understanding of multiculturalism, as well as its prospects within the education community. The results of the research indicate that to achieve the goals of multicultural education, the participation and support of teachers or professors, educational institutions, and other education policymakers are crucial. Multicultural education can be implemented if done with the concepts and limitations of Islamic Shariah.

Keywords: *Education, Multiculturalism, Prospects, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki pluralitas dan merupakan belahan bumi yang multikultural, maka diperlukan visi dan perhatian yang intens terhadap sistem nilai dan etika yang menghargai pluralitas dan perbedaan yang ada. Kondisi yang plural dan multikultural tersebut juga menuntut peranan agama dan penganutnya sebagai partner penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin kompleks dan rentan terhadap konflik.

Lima penyebab terjadinya konflik yang disebabkan faktor agama, pertama pemahaman literal-skriptural terhadap kitab suci sehingga melahirkan sikap eksklusif-apologetik umat, yang pada dataran kehidupan sosial merupakan sikap kompromi dan dialog. Kedua, adanya ketidakpercayaan antarpemeluk agama atau kelompok, menimbulkan tuduhan pada seseorang dalam kufr, murtad, munafik, ingkar dan tuduhan lain. Ketiga, mengkambing-hitamkan agama sebagai pemicu ketidak-adilan sosial, padahal masalah sebenarnya adalah kebijakan politik, sosial, ekonomi dan faktor lain yang lebih signifikan yang membonceng agama. Keempat, adanya upaya memanfaatkan agama sebagai sarana konflik dan kekerasan sosial (pembakaran gereja mewah di Situbondo). Kelima adanya gerakan radikalisme keagamaan atau fundamentalisme, yang pada hakekatnya merupakan gerakan politik yang diselubungi keyakinan agama.

Memandang latar belakang historis dan mengamati fenomena yang ada, tidak berbagai upaya untuk meminimalisir konflik (Tabroni et al., 2020). Salah satunya adalah lewat jalan preventif melalui jalur pendidikan, agar nilai-nilai keagamaan (plurality), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice) dan nilai-nilai demokratis dapat ditanamkan pada peserta didik (Ledang, 2016). Melalui penanaman nilai-nilai tersebut sejak usia dini diharapkan dapat efektif menciptakan masyarakat berwawasan multicultural (Fauzi, 2023). Namun demikian efektifitas tersebut bergantung juga pada peran para pendidik, pemimpin (manajemen), dan praktisi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai multikultural (Miftahur, 2022).

Pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, mestinya perlu untuk dikaji kembali sesuai dengan kebutuhan mendesak pada era multikultural ini. Pendidikan di Indonesia secara esensial sedikit sekali menyentuh persoalan bagaimana menghargai kepercayaan-kepercayaan keagamaan dan keagamaan kultural yang kaya (Mulyono, 2019). Pada kenyataannya pendidikan yang berlaku justru terhadap kecenderungan homogenisasi, baik atas nama atau berpayung pada kebudayaan nasional, kebudayaan Jawa dan praktek pemiskinan budaya.

Munculnya isi pendidikan berwawasan multicultural adalah sebagai reaksi atau berkembangnya aksi kekerasan dan konflik yang dipicu oleh perbedaan agama, suku, ras dan golongan (Machali, 2013). Pendidikan multikultural adalah model yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan upaya menanggulangi konflik yang berkembang (Afif, 2012). Dengan menggunakan dasar nilai-nilai pluralisme-multikulturalisme, pendidikan ini mengutamakan penanaman dan pembumian nilai-nilai toleransi, dialog antarperbedaan, empati dan solidaritas sosial.

Upaya tersebut sebagai cara sistematis, terprogram dan berkesinambungan dalam pembentukan masyarakat multikultural Indonesia. Kedua, memabangun saling percaya (mutual trust). Ketiga, memiliki dan memelihara saling pengertian (mutual understanding). Keempat, menunjang sikap saling menghargai (mutual respect). Kelima, mempunyai karakter terbuka dalam berfikir. Keenam, mendidik peserta didik akan perlunya membagi kepedulian tentang apresiasi dan interdependensi umat. Ketujuh, pendidikan memfungsikan agama sebagai cara dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi tindakan nir kekerasan. Dengan demikian pendidikan multikultural bukan hanya berhubungan dengan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik dan metode, tetapi justru yang terpenting adalah bagaimana pendidikan dapat mengkonstruksi pandangan dunia, kritik terhadap budaya dan peradaban, dan menemukan kembali budaya yang hakiki yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan tentang pendidikan multikulturalisme dan prospeknya di Indonesia. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan publikasi akademis, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami penelitian terdahulu, isu-isu terkini, dan perkembangan dalam bidang multikulturalisme di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan data langsung dari berbagai pemangku kepentingan terkait pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Responden potensial untuk wawancara ini termasuk pejabat pemerintah, pendidik, pengelola lembaga pendidikan, siswa, dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam isu multikulturalisme. Wawancara akan

memberikan perspektif yang mendalam tentang tantangan, prospek, dan opini mengenai pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang lebih besar dalam populasi tertentu, misalnya guru atau siswa di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Survei ini dapat membantu mendapatkan informasi yang lebih luas tentang persepsi, sikap, dan pemahaman tentang multikulturalisme, serta prospeknya di kalangan pendidikan.

HASIL DAN DISKUSI

Pemikiran Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang terkini dalam IPTEK. Multikulturalisme terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia khususnya di dalam era dunia terbuka dan era demokratisasi kehidupan (Manurung et al., 2022). Perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat mendorong orang berpikir tentang liberalisme (Suradi, 2018). Salah satu kritik yang tajam terhadap paham politik liberalisme yaitu diperhitungkannya adanya kenyataan sosial yaitu perbedaan budaya dalam kehidupan manusia. Di atas telah dijelaskan mengenai hak untuk mempunyai budaya sendiri (*right to culture*) yang diabaikan dalam kehidupan politik sampai deakde terakhir abad 20. Peranan budaya ternyata sangat besar di dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang berjenis-jenis dan sebaliknya pengakuan terhadap kebudayaan yang berjenis-jenis berarti pula pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan berbudaya (Hadi, 2022). Multikulturalisme menjadi pendukung pluralisme yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai di dalam masyarakat yang pluralistis (Wirasari et al., 2018). Inilah proses demokratisasi yang sempurna karena meliputi bukan hanya hak-hak politik dan hak individu, tetapi juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat.

Melihat kondisi sosial, budaya dan politik di tanah air, perlu kiranya menyusun konsep pendidikan multikultural.

1. *Right to culture* dan identitas budaya lokal
2. Kebudayaan Indonesia yang menjadi
3. Konsep pendidikan multikultural normatif
4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial
5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru.
6. Pendidikan kultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.

Menurutnya corak Bhinneka Tunggal Ika bukanlah lagi keanekaragaman suku bangsa dan budayanya, tetapi lebih pada keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia (Nurcahyono, 2018). Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2014). Pembangunan masyarakat multikultural dalam diri bangsa Indonesia dapat terjadi bila konsep multikulturalisme menyebar luas dan menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya

keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya perlu ditanamkan. Juga perlu ada upaya-upaya real.

Konsep-konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Masyarakat manusia pada dasarnya adalah masyarakat yang berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbeda-beda: bermasyarakat nasional, bermasyarakat lokal, bermasyarakat nasional dan global. Dan menjadi tugas para elit, bukan hanya *local genius* tetapi *national genius* untuk melakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah terjadi dan sudah dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Krisis demi krisis, perang demi perang, konflik demi konflik terjadi, yang senantiasa memerlukan pengelolaan untuk penyelesaiannya agar diperoleh transformasi/hikmah/*blessing*, sehingga peradaban manusia menjadi meningkat, lebih beradab (lebih berbudaya, lebih cerdas, lebih bermoral).

Hikmah yang dapat diambil dari seluruh proses temu budaya, dialog budaya dan prakongres kebudayaan itu sendiri, menunjuk pada program-program, antara lain:

1. Melalui penelitian dan pengembangan (Litbang) pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sesuai dengan amandemen UUD mengenai masyarakat adat dan kebudayaan serta pengukuhan ideologi kebangsaan melakukan penelitian dan pengembangan: penelitian bukan saja tentang sistem nilai sesuatu masyarakat tetapi mencakup integrasinya dengan nilai-nilai lain.
2. Tiap-tiap lembaga agama dalam rangka dakwah/penyebaran/siar agama harus melakukan litbang, juga lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga litbang pemerintah dan lembaga litbang kampus harus melakukan penelitian sistem nilai dan perkembangannya.
3. Melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan integrasi nilai-nilai secara dinamik dan terbuka: karena *values as integrating forces* menghindari benturan kebudayaan seperti halnya kasus Sidiknas dan lain-lain, agar tidak menjadi konflik terbuka.
4. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi-organisasi kebudayaan.

Dengan membaca buku ini kita akan yakin bahwa multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara budaya. Multikulturalisme, yang tidak persis sama dengan pluralisme, menurut Lawrence Blum merupakan sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain dan ini juga mencakup upaya mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Dengan pengertian adanya toleransi untuk menerima dan menghargai

pendapat orang lain, kendatipun berbeda. Terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang:

1. Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (*culture difference*). Perubahan ini terutama siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam mainstream budaya yang ada.
2. Hubungan manusia (*human relation*). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial.
3. *Singles group studies*. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat.
4. Pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi yang menekankan adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan akan ekuilitas sosial.
5. Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Program ini dinamakan "*critical multicultural education*".

Pendidikan Multikulturalisme Dan Prospeknya Di Indonesia

Secara sederhana bahwa *multikulturalisme* berarti “keberagaman budaya”. Sebenarnya, ada tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut – baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda - yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*).

Ketiga ekspresi di atas pada hakekatnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun ketiga-tiganya mengacu pada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep *pluralitas* mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep tersebut, *multikulturalisme* sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari *multikulturalisme* adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama (Firmansyah, 2020).

Kalau *pluralitas* hanya sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), justru *multikulturalisme* memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Oleh karena itu, *multikulturalisme* menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Artinya, bahwa adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa *multikulturalisme* sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan

(*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai *entitas* dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.

Perbedaan dalam masyarakat modern bisa berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama hingga menjadi semacam *common sense*. Perbedaan tersebut menurut bisa dikategorikan dalam tiga hal - salah satu atau lebih dari tiga hal-, yaitu *pertama* perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perpektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).

Ruang Multikultural adalah sebuah ruang *kontestasi*. Wacana ini hampir menjadi wacana dominan yang tak terbantahkan ketika ditawarkan sebagai solusi atas berbagai macam perbedaan (*difference*) dan keberagaman (*diversity*) yang merupakan realitas masyarakat global (*global society*). Multikulturalisme menjadi semacam manajemen perbedaan untuk menjaga keharmonisan dan dinamisasi kehidupan sosial masyarakat.

Multikultural, berwujud menjadi sebuah gerakan, dengan defenisi seperti ini, maka multikultural harus bisa dibedakan dengan realitas budaya yang plural. Multikultural merupakan sebuah proyek atau usaha sadar untuk mengatur dan mendinamisasi hubungan (*relation*) antar kultur, sementara *plural* hanyalah sebuah kondisi yang sudah ada sebagai realitas. Dengan demikian, gerakan *multikulturalisme* merupakan proyek multidimensional yang melibatkan berbagai etnis dan berbagai macam kegiatan.

Sementara itu, *multikulturalisme* juga diartikan oleh beberapa kalangan sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya ialah sebagai sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas (*minority groups*) vs mayoritas (*majority group*), yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (*equality*), kesetaraan, dan keadilan (*justice*). Pluralisme diartikannya sebagai pandangan yang menghargai kemajemukan, serta penghormatan terhadap orang lain yang berbeda (*the others*), membuka diri terhadap berbagai keyakinan, kerelaan untuk berbagi (*sharing*), keterbukaan untuk saling-belajar (*inklusivisme*), serta keterlibatan diri secara aktif di dalam dialog dalam rangka mencari persamaan-persamaan (*common belief*) dan menyelesaikan konflik-konflik.

Multikullturalisme sebagai sebuah konsep dan tawaran solutif atas berbagai problem sosial, di atas kertas memang memiliki jaminan perbaikan, namun secara *inhern*, tidak bisa dinafikan adanya *ambiguitas* di dalamnya. Seperti di sinyalir oleh Manneke Budiman, ada tiga hal yang harus diwaspadai dalam *multikulturalisme*, yaitu; *pertama*, ketika multikulturalisme bergeser menjadi ideologi, maka multikulturalisme yang pada mulanya merupakan arena kontestasi, pada titik ini juga menjadi pemain. Pertanyaan yang

patut diajukan adalah mungkinkah multikulturalisme tetap konsisten untuk majemuk, terbuka dan akomodatif dalam arena kontestasi ideologi.

Kalaupun pertanyaan pertama terjawab, pertanyaan *kedua* yang menjadi masalah *multikulturalisme* adalah mungkinkah *multikulturalisme* menang tanpa menggunakan strategi penyingkiran dan pembungkaman terhadap yang lain. Sementara itu sebagaimana *mahfum*, ideologi cenderung untuk menyingkirkan dan membungkam lawan-lawannya, hal ini karena ideologi selalu bersifat eksklusif dan tertutup.

Problem yang *ketiga* adalah pemahaman multikulturalisme mengalami reduksi sebagai sekedar kondisi plural, seperti di Indonesia. Kalau pembahasan ini coba di batasi pada ruang lingkup Indonesia, maka akan di temukan adanya penyimpangan ini secara nyata. Baik pada persoalan kultural secara luas, maupun pada persoalan agama secara spesifik.

Penyelewengan multikulturalisme menjadi sekedar pluralisme yang terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah keagamaan, ini lebih merupakan akibat dari bangunan teologi yang berkembang. Ini pula yang menjadi kendala perguliran wacana syariat Islam. Pembagian corak teologi akan ditemukan betapa corak teologi seseorang atau sebuah komunitas keagamaan maupun kultural akan sangat berpengaruh bagi proyek multikulturalisme.

Corak teologi itu adalah *pertama*, teologi **eksklusif**. Teologi ini merupakan teologi yang paling ideologis, sifatnya sangat tertutup dan menempatkan teologinya sebagai satu-satunya kebenaran. *Kedua*, teologi **apologetik**. Model teologi apologetik tidak se ekstrim teologi eksklusif, namun mereka tetap berusaha menjelaskan bahwa teologi merekalah yang benar dengan berusaha mencari berbagai macam apologi atau sistem pembenaran. *Ketiga*, teologi **inklusif**. Dalam teologi seperti ini, sudah ada ruang pengakuan terhadap teologi diluarnya, namun kesimpulan akhir akan kebenaran tetap kembali pada dirinya. Teologi lain memang memiliki kebenaran, tetapi intensitas kebenaran teologi lain tetap berada di bawah kebenaran teologinya. *Keempat*, teologi **sinkretis**. Teologi yang paling nyeleneh dan cenderung menyederhanakan masalah kebenaran, karena menganggap semua teologi sama saja sehingga lebih baik dan sah bila antar teologi itu ada perkawinan dan pembauran konsep.

Terakhir, kelima, teologi **pluralis**. Teologi model inilah yang paling pas untuk terbangunnya proyek *multikulturalisme*. Hal ini karena teologi model ini mengakui bahwa setiap teologi memiliki eksistensi masing-masing, namun semuanya berada dalam tahap proses, sehingga dinamisasi dan dialektika yang terwujud dalam bentuk kontestasi dan dialektika antar teologi lebih memungkinkan.

Penerapan pendidikan *multicultural* di Indonesia nampaknya tidak asing lagi, sebab Indonesia melebihi kebanyakan negara-negara lain, merupakan negara yang tidak saja multi-suku, multi-etnik, multi-agama tetapi juga multi-budaya (Maksum, 2015). Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun, pada sisi lain, kemajemukan tersebut apabila tidak dikelola dan dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang

dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peristiwa Ambon dan Poso, misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah menguras energi dan merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia.¹ Maka, disinilah diskursus dan implementasi multikulturalisme menemukan tempatnya yang berarti dan tentu saja pendidikan menjadi satu faktor penting.

Ketika wacana *multicultural* ini masuk dalam dunia pendidikan di Indonesia, ternyata banyak kalangan yang merespon secara positif, namun ada pula yang sebaliknya, menolak konsep tersebut. Namun demikian, walau bagaimanapun wacana pendidikan multikulturalisme ini akan selalu berkembang terus di masa mendatang. Sebab, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pengakuan terhadap perbedaan ras, suku, agama sejak nenek moyang bangsa ini selalu dijunjung tinggi, dan itu merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan adanya.

Pada hakekatnya, jika kita mau memahami makna yang sebenarnya, *multicultural* ini tidak bertentangan dengan budaya bangsa, justru sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, yang intinya tidak membedakan antara satu orang dengan yang lainnya dalam segala hal. Lebih-lebih ajaran Islam, tidak pernah melarang adanya perbedaan, justru sebaliknya sebagaimana sabda Nabi Saw; *ikhthilafu ummatiy rahmah* (perbedaan di antara ummatku adalah rahmat).

Oleh karenanya, menurut hemat penulis konsep pendidikan *multicultural* ini sangat perlu dilaksanakan, dengan catatan melalui pemahaman dan arah yang jelas. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang menawarkan konsep persamaan, menghargai dan menghormati pluralitas dan heterogenitas, menghargai keragaman (budaya, agama, suku, bangsa, etnis). Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki relevansi dengan ajaran Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia akan sangat prospektif jika didukung oleh masyarakat dan pengembangan konsep-konsep yang relevan (Prasetyawati, 2017). *Multikulturalisme* bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep.

Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya

dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Meskipun demikian, apabila kita menganut agama Islam misalnya, mestinya tetap harus meyakini akan kebenaran agama Islam. Bukan berarti menyalahkan orang lain dan tidak mengakui keberadaannya, sehingga perlu dimusuhi. Namun sebaliknya, umat Islam perlu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi), saling menghargai pluralitas, tidak membedakan dalam bersikap dan memutuskan kebijakan, sehingga dalam masalah ibadah selalu memakai prinsip *lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Sebagaimana diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa wacana multikulturalisme dalam konteks Al Quran adalah mengupayakan pengenalan dan pemahaman SARA dalam upaya memahami heterogenitas, yakni menerapkan hakekat pendidikan multikultural. Hakekat pendidikan multikultural adalah mengupayakan dan melembagakan filsafat pluralisme budaya dalam sistem pendidikan dengan membumikan prinsip persamaan, saling menghargai, saling mengenal, menerima dan memahami serta adanya komitmen moral terhadap keadilan sosial itu sendiri.

Melihat konsep pendidikan multikultural yang demikian, nampaknya akan memiliki prospek bagi pengembangan dan implementasinya pada dunia pendidikan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan pada lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah Islam.

Permasalahan yang selama ini muncul antara lain dengan berkembangnya aliran-aliran keras (yang dikenal *fundamentalis*), pemahaman *tekstualis*, *formalis*, dan bahkan *anarkisme*. Mereka sering menentang konsep multikultural yang selama ini menjadi wacana *public*, namun seiring berjalannya waktu, melalui berbagai seminar, diskusi dan perbincangan ilmiah, nampaknya bisa dilihat batasan-batasan pemahaman mengenai konsep multikultural yang diterima atau yang ditolak dari masing-masing paham ini.

Hal ini juga merupakan salah satu tantangan bagi kaum Muslim moderat di dunia Islam dewasa ini, khususnya di Indonesia, adalah tumbuh suburnya *fundamentalisme Islam* yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam melampiasikan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan. Sudah semestinya para pemimpin dan tokoh-tokoh *islamisme* di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan *multikulturalisme* baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang belum sepenuhnya buntu.

Melalui berbagai kajian dan dialog tentang wacana pendidikan multikultural ini diharapkan konsep ini tidak hanya dipahami, namun bisa diterapkan pada lembaga pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, maka pendekatan yang digunakan dalam system pendidikan kita ini bisa melalui tiga model, kita dapat membedakan adanya tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan (1) perspektif "*cultural assimilation*"; (2) perspektif "*cultural pluralism*"; dan (3) perspektif "*cultural synthesis*".

Pertama, merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subyek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub-nasional ke dalam suatu "*core society*", *kedua* suatu sistem pendidikan

yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. *Ketiga* merupakan sintesis dari perspektif *asimilasionis* dan *pluralis*, yang menekankan pentingnya proses terjadinya *eklektisme* dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional.

Pendidikan multikulturalisme yang selama ini dikembangkan di Indonesia, setidaknya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuannya membentuk” manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya (berperadaban)”.
2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (cultural).
3. Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis).
4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

Guru atau dosen perlu memahami konsep dan strategi pendidikan multikultural agar nilai-nilai utama yang terkandung dalam strategi dan konsep pendidikan tersebut seperti pluralisme, demokrasi, humanisme, dan keadilan dapat juga diajarkan sekaligus dipraktikkan dihadapan para peserta didik sedemikian rupa, seorang guru atau dosen tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik mempunyai pemahaman dan keahlian terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan pluralisme.

Secara kongkrit tujuan tersebut meliputi:

- a. Pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial.
- b. Pendidikan multikultural sebagai pembina agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya
- c. Sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan nasional.
- d. Menciptakan masyarakat multikultural.

Pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, nampaknya akan memiliki prospek yang mapan jika semua kalangan ikut terlibat dalam merumuskan konsepnya sesuai dengan ke-Indonesiaan. Sedangkan terkait dengan pendidikan Islam multikultural, setidaknya perlu adanya diskusi dan tukar pikiran di antara para tokoh Islam, baik dari kalangan yang mewakili Islam *tradisionalis-liberalis*, *moderat*, *tekstualis-fundamentalis*, dan sebagainya. Lebih-lebih ada yang mewakili pemikiran *tradisionalis-liberalis* dan ada juga yang mewakili pemikiran *tekstualis-fundamentalis*, perlu mengadakan seminar dan dialog terbuka, sehingga diharapkan memunculkan ide-ide kreatif yang relevan bagi suksesnya penerapan pendidikan berbasis multicultural.

KESIMPULAN

Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku,

dan aliran (agama). Secara kongkrit tujuan pendidikan multikultural meliputi: a) Pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pemecahan konflik social, b) Pendidikan multikultural sebagai pembina agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya, c) Sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan nasional, d) Menciptakan masyarakat multikultural.

Pendidikan multikultural dalam konteks ini adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. dan yang terpenting dari strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi. Agar tujuan pendidikan multikultural ini dapat dicapai, maka diperlukan adanya peran serta dan dukungan dari guru atau dosen, institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan pendidikan lainnya. Pendidikan *multicultural* ini dapat di terapkan jika dilakukan dengan konsep dan batasan-batasan syari'ah Islam. Tanpa menerapkan atau formalisasi hukum Islam.

BLIBLIOGRAPHY

- Afif, A. (2012). Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–18.
- Fauzi, F. (2023). Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Menanamkan Nilai-Nilai Keberagaman Dalam Islam Pada Anak Usia Dini. *Journal on Education*, 5(3), 5543–5555.
- Firmansyah, F. (2020). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(2), 164–169.
- Hadi, M. L. I. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Perspektif Piagam Madinah dalam Pendidikan Nasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)*.
- Ledang, I. (2016). Tradisi islam dan Pendidikan Humanisme: upaya Transinternalisasi nilai Karakter dan multikultural dalam Resolusi Konflik sosial masyarakat di indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1).
- Machali, I. (2013). Peace education dan deradikalisasi agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 41–64.
- Maksum, A. (2015). Model pendidikan toleransi di pesantren modern dan salaf. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 81–108.
- Manurung, N. U., Maimunah, S., & Rahma, E. (2022). Pengantar Kajian Masyarakat Global. *Jurnal Bakti Sosial*, 1(1), 23–28.

- Miftahur, R. (2022). *Manajemen Strategi Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Di Madrasah Aliyah Dan Sekolah Menengah Atas Lampung Tengah (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Mulyono, M. (2019). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 7(1), 45–62.
- Nurcahyono, O. H. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Analisis sinkronis dan diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 105–115.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272–303.
- Suparlan, P. (2014). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Antropologi Indonesia*.
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara di Era Globalisasi. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 111–130.
- Tabroni, R., Zakaria, M. M., Dienaputra, R. D., & Mulyadi, R. M. (2020). Memandang Wajah Negara Islam Di Indonesia: Usaha Pembelajaran Sejarah Melalui Materi Konflik. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 10(1), 16–34.
- Wirasari, W., Bain, B., & Atno, A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Multikultural pada Mata Pelajaran Sejarah terhadap Sikap Pluralis Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Pekalongan Tahun Pelajaran 2017/2018. *Indonesian Journal of History Education*, 6(1), 76–88.

Copyright Holder:

Slamet Panuntun, Asyrofi Aziz (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

